



BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
7. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Sekretariat Daerah dalam menyusun RKA Sekretariat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 61



RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

TAHUN
2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Rencana Kerja (RENJA) merupakan tahapan awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RENJA adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud
Maksud Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu Pada RKPD Kabupaten Pasuruan dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.
- Tujuan
Renja Sekretariat Daerah ini disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah - kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2020 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2021. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2020 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Adapun ketercapaian tujuan pembangunan daerah di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah.

Pada tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki 13 program dan 89 kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, sedangkan Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki 3 program, 20 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri nomor 050.3708 tahun 2020

Pada tahun 2020, di peroleh data program dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan telah berjalan lancar sesuai ketentuan dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra OPD dengan kesimpulan **Berhasil**.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam format tabel 2.1

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN PASURUAN

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Tahun 2020									
	PROGRAM OTONOMI DAERAH DAN KEWILAYAHAN	Out come : Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Out put : Jumlah dokumen LPPD	70 buku		40 buku	40 buku	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Out put : Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pemerintahan daerah	12 laporan koordinasi		12 laporan koordinasi	12 laporan koordinasi	100%			
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Out put : Jumlah laporan administrasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Out put : Jumlah koordinasi dengan OPD dan Forkompinda	4 laporan koordinasi		4 laporan koordinasi	4 laporan koordinasi	100%			
		Out come : Jumlah Penetapan dan penegasan batas wilayah (Akumulasi s.d Th. N)	9 wilayah		9 wilayah	9 wilayah	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah serta Pembakuan Nama Rupabumi	Out put : Jumlah koordinasi kegiatan batas wilayah dan pembakuan nama rupa bumi	12 laporan koordinasi		12 laporan koordinasi	12 laporan koordinasi	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan	Out put : Jumlah koordinasi permasalahan Kewilayahan dan Pertanahan	6 laporan koordinasi		6 laporan koordinasi	6 laporan koordinasi	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	Out come : Prosentase kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang ditindak lanjuti	100%		100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Draft Kerjasama Daerah, Pihak ketiga dan perbatasan wilayah	Out put : Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	24 Kali/kegiatan		24 Kali/kegiatan	24 Kali/kegiatan	100%			
	Kegiatan Penjajakan dan Koordinasi Kerjasama antar daerah	Out put : Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	14 Kali/kegiatan		14 Kali/kegiatan	14 Kali/kegiatan	100%			
	Kegiatan Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama Wilayah Perbatasan	Out put : Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Perbatasan Wilayah	40 Kali/kegiatan		40 Kali/kegiatan	40 Kali/kegiatan	100%			
	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penjajakan kerjasama dengan Pihak Ketiga	Out put : Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama dengan instansi lainnya	18 Kali/kegiatan		18 Kali/kegiatan	18 Kali/kegiatan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah, Kerjasama Perbatasan Wilayah dan Kerjasama Pihak Ketiga	Out put : Jumlah Monev Kerjasama Daerah yang ditanda tangani	6 daerah dan 2 pihak ketiga		6 daerah dan 2 pihak ketiga	6 daerah dan 2 pihak ketiga	100%			
	Rapat Koordinasi, Sosialisasi,Work shop,Seminar, Sarasehan dan perjalanan dinas lainnya	Out put : Terlaksananya kegiatan work shop,Sosialisasi, Seminar dan Sarasehan	2 Kali/kegiatan		2 Kali/kegiatan	2 Kali/kegiatan	100%			
	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Outcome : Persentase fasilitasi pembentukan produk hukum dan penyebarluasan informasi produk hukum	100%		100%	100%	100%			
	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	output : Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	200 laporan		40 laporan	40 laporan	100%			
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	output : Jumlah draft produk hukum yang diteliti	1000 Produk Hukum		800 produk hukum	823 produk hukum	102,87%			
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	output : Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	5000 Produk Hukum		1000 produk hukum	1000 produk hukum	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	output : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi, Penyuluhan Hukum dan Temu Sadar Hukum	135 kali		27 kali	27 kali	100%			
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	output : Jumlah produk hukum dan kegiatan di Bagian Hukum yang dipublikasikan melalui website JDIH	350 produk		70 produk	70 produk	100%			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI BIDANG PEREKONOMIAN	Outcome : Prosentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	95%		80%	80%	100%			
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketersediaan dan Penyaluran Sapropdi	output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev sapropdi	60 laporan		16 laporan	16 laporan	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan BUMD	output : Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD	50 laporan		10 laporan	10 laporan	100%			
	Kegiatan Fasilitasi KUR dan Pengembangan KUMKM/IKM	output : Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi KUR dan pengembangan KUMKM	39 laporan		5 laporan	5 laporan	100%			
	Kegiatan Fasilitasi Pemasaran melalui Promosi Potensi Daerah	output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	74 laporan		6 laporan	6 laporan	100%			
	Kegiatan Koordinasi dan Monev Penggunaan Energi dan SDA	output : Jumlah laporan hasil koordinasi dan monev penggunaan energi dan SDA	80 laporan		6 laporan	6 laporan	100%			
	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	output : Jumlah laporan hasil koordinasi pengendalian inflasi daerah	48 laporan		6 laporan	6 laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Outcome : Prosentase peningkatan capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah	95%		80%	80%	100%			
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Cukai	output : Jumlah Laporan Koordinasi Pemanfaatan DBHCHT	122 laporan		20 laporan	20 laporan	100%			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Outcome : Persentase Kebijakan Lingkup Bidang Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100%		100%	80%	55%			
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutin Keagamaan	Output : Jumlah laporan kegiatan rutin keagamaan	16 laporan		4 laporan	4 laporan	100%			
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Amaliah Ramadhan	Output : Jumlah laporan kegiatan Amaliah Ramadhan	20 laporan		5 laporan	2 laporan	40%			
	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam	Output : Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	24 laporan		6 laporan	2 laporan	33%			
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pasuruan Bersholawat	Output : Jumlah laporan kegiatan Pasuruan Bersholawat	4 laporan		1 laporan	0 laporan	0%			
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dzikir Akbar	Output : Jumlah laporan kegiatan Dzikir Akbar	4 laporan		1 laporan	0 laporan	0%			
	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hari Santri	Output : Jumlah laporan kegiatan Hari Santri	4 laporan		1 laporan	1 laporan	100%			
	Pelaksanaan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	Output : Jumlah laporan kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	48 laporan		12 laporan	1 laporan	0,8%			
	Kegiatan Penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	Output : Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	12 laporan		3 laporan	3 laporan	100%			
	Kegiatan Pelayanan Kegiatan Ibadah Haji	Output : Jumlah laporan pelayanan kegiatan Ibadah Haji	8 laporan		2 laporan	0 laporan	0%			
	Kegiatan Koordinasi administratif sosial budaya	Output : Laporan hasil koordinasi administrasi sosial budaya	60 laporan		15 laporan	15 laporan	100%			
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi hibah / bantuan sosial	Output : Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	780 lembaga		410 lembaga	337 lembaga	82%			
	PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	Outcome : Persentase paket pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan	100%		99%	99%	100%			
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	output : Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	1700 paket		300 paket	300 paket	100%			
	Kegiatan Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	output : Jumlah Pembinaan dan Konsultasi Permasalahan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	9 kali		2 kali	2 kali	100%			
	Kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa	output : Jumlah desa yang dimonitor dan dievaluasi	341 desa		68 desa	68 desa	100%			
	Kegiatan Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	output : Jumlah Personil pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berhasil dibina	2000 orang		400 orang	400 orang	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	output : Jumlah Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berhasil dicetak	500 buku		100 buku	100 buku	100%			
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	output : Jumlah Kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan	8 kali		2 kali	2 kali	100%			
	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Outcome : Prosentase kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang ditindaklanjuti	80%		80%	80%	100%			
	Kegiatan Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan dan litbang	Output : Jumlah laporan fasilitasi perencanaan pembangunan dan litbang	10 laporan		10 laporan	10 laporan	100%			
		Outcome : Prosentase kegiatan yang tertib administrasi	80%		80%	80%	100%			
	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga	250 buku		250 buku	250 buku	100%			
	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	Output : Jumlah Buku Analisa Standar Belanja	250 buku		250 buku	250 buku	100%			
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Output : Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	750 paket		750 paket	750 paket	100%			
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Output : Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	285 buku		285 buku	285 buku	100%			
	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Fisik	Output : Jumlah sosialisasi proyek fisik di kecamatan	24 laporan		24 laporan	24 laporan	100%			
	Kegiatan Penyusunan dan Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Output : Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD dan Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang disusun	750 buku		500 buku	500 buku	100%			
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Outcome : Presentase jumlah realisasi anggaran	89%		86%	86%	100%			
		Outcome : Presentase fasilitasi perlengkapan yang terpenuhi terhadap Rencana Kebutuhan Barang/Jasa	94%		91%	91%	100%			
	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerja Setda	Output : Jumlah Dokumen	8 Dok		2 Dok	2 Dok	100%			
	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Keuangan	Output : Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan dan PTT	- OB		1112 OB	1112 OB	100%			
		Output : Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keuangan	- Kali		49 Kali	49 Kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah pembelian ATK, barang cetakan dan fotocopy	- Jenis		65 Jenis	65 Jenis	100%			
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan	13 Unit		5 Unit	5 Unit	100%			
	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Output : Jumlah mebelair	928 Unit		15 Unit	15 Unit	100%			
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Output : Jumlah peralatan kantor	360 Unit		1 ls	1 ls	100%			
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	480 unit		3 unit	3 unit	100%			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana	Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara	16 unit kali		4 unit kali	4 unit kali	100%			
		Output : Jumlah pemeliharaan gedung kantor	400 unit kali		100 unit kali	100 unit kali	100%			
		Output : Jumlah pemeliharaan mebelair	200 unit kali		50 unit kali	50 unit kali	100%			
		Output : Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan kantor	876 unit kali		219 unit kali	219 unit kali	100%			
	PROGRAM OPTIMALISASI FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	Outcome : Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%		95%	95%	100%			
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Output : Jumlah laporan hasil pembinaan SAKIP	20 laporan		4 laporan	4 laporan	100%			
	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Budaya Kinerja (KKBK)	Output : Jumlah Unit Kerja yang mengikuti bimtek KKBK	392 unit kerja		65 unit kerja	65 unit kerja	100%			
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda	Output : Jumlah dokumen kepegawaian setda	40 dokumen		10 dokumen	10 dokumen	100%			
		Outcome : Presentase Perangkat Daerah yang mempunyai standart pelayanan	98%		92%	92%	100%			
	Kegiatan Pembinaan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik	Output : Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik	496 unit kerja		65 unit kerja	65 unit kerja	100%			
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Output : Jumlah laporan / dokumen hasil koordinasi	24 laporan		3 laporan	3 laporan	100%			
	Kegiatan Pembinaan Ketatalaksanaan Unit Kerja	Output : Jumlah unit kerja yang dibina ketatalaksanaan pemerintahan	260 unit kerja		65 unit kerja	65 unit kerja	100%			
		Outcome : Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%		100%	100%	100%			
	Kegiatan Evaluasi Penataan dan Penetapan SOTK Kelembagaan OPD	Output : Jumlah perangkat daerah yg dievaluasi Kelembagaannya	187 Perangkat Daerah/Unit Kerja		56 Perangkat Daerah/Unit Kerja	56 Perangkat Daerah/Unit Kerja	100%			
	Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan/ Analisa Beban Kerja/SKJ/ Evjab	Output : Jumlah dokumen klasifikasi jabatan perangkat daerah	155 dokumen SKJ/Evjab		56 dokumen SKJ/Evjab	56 dokumen SKJ/Evjab	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Outcome : Prosentase kegiatan /laporan selesai tepat waktu	90%		100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Output : Jumlah rekening tlp, air minum, listrik yang terbayar	415 rekening		87 rekening-bulan	87 rekening-bula	100%			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	30 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan yang terbayarkan dan pembelian alat kebersihan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah pembelian alat tulis kantor	150 jenis		73 jenis	73 jenis	100%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan & penggandaan	300 jenis		31 jenis	31 jenis	100%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	175 jenis		35 jenis	35 jenis	100%			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	175 jenis		35 jenis	35 jenis	100%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah kegiatan rapat dan tamu	750 kegiatan		150 kegiatan	150 kegiatan	100%			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Output : Jumlah laporan perjalanan dinas luar Setda	1250 laporan		210 laporan	210 laporan	100%			
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Output : Jumlah jenis jasa perkantoran yang terbayarkan	60 jenis		12 jenis	12 jenis	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%		85%	85%	100%			
	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan	Output : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah dinas / jabatan	20 jenis		10 jenis	10 jenis	100%			
	Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	Output : Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan			4 jenis	4 jenis	100%			
	Pengadaan Peralatan Kantor	Output : Jumlah pengadaan belanja modal peralatan kantor			4 jenis	4 jenis	100%			
	Pengadaan Mebelair	Output : Jumlah pengadaan belanja modal mebelair			10 jenis	10 jenis	100%			
	Pemeliharaan Rutin / Berakala Rumah Dinas	Output : Jumlah rumdin yang dipelihara	10 unit		2 unit	2 unit	100%			
	Pemeliharaan Rutin / Berakala Mobil Jabatan	Output : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	15 kendaraan		4 kendaraan	4 kendaraan	100%			
	Pemeliharaan Rutin / Berakala Kendaraan Dinas Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	255 kendaraan		51 kendaraan	51 kendaraan	100%			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah tangga	Output : Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara	7 jenis		9 jenis	9 jenis	100%			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara			1 Ls	1 Ls	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Output : Jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara			1 Ls	1 Ls	100%			
	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	Outcome : Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%		100%	100%	100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output : Jumlah pengadaan pakaian Dinas Bupati / Wakil Bupati	16 stel		4 stel	4 stel	100%			
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Output : Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	600 orang		60 orang	60 orang	100%			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Output : Jumlah pengadaan pakaian olah raga Bupati / Wakil Bupati	30 stel		8 stel	8 stel	100%			
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Output : Pelayanan kesehatan KDH/WKDH	10 jenis		2 jenis	2 jenis	100%			
	Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Output : Jumlah kegiatan dialog / audensi	120 acara		15 Acara	15 Acara	100%			
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	Output : Jumlah kunjungan tamu ke wilayah Kab. Pasuruan	60 kegiatan		12 Kegiatan	8 Kegiatan	100%			
	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Output : Perjalanan dinas dlm daerah KDH/WKDH dan patwal			60 laporan	25 laporan	100%			
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Output : Perjalanan dinas luar daerah KDH/WKDH			1 laporan	1 laporan	100%			
Tahun 2021										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Out come	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100 %			100 %	100 %	100%
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Out come	: Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti		100 %			100 %	100 %	100%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Out put	: Jumlah Dokumen LPPD		70 dokumen			70 dokumen	70 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Out put	: Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan		4 laporan			4 laporan	4 laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Out put	: Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopinda		12 laporan			12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Out come	: Persentase fasilitas kerjasama yang ditindaklanjuti		100 %			100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Out put : Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	12 laporan					12 laporan	12 laporan	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Out put : Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	2 laporan					2 laporan	2 laporan	100,00%
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Out put : Jumlah laporan evaluasi kerjasama	5 laporan					5 laporan	5 laporan	100,00%
	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Outcome : Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %					100 %	100 %	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Output : Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	105 laporan					35 laporan	35 laporan	33,33%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Output : Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	2235 laporan					745 laporan	745 laporan	33,33%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Output : Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	45 laporan					15 laporan	15 laporan	33,33%
	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Outcome : Persentase Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	100 %					100 %	100 %	40%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	output : Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	968 produk hukum					800 produk hukum	800 produk hukum	40%
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	output : Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	28 laporan					28 laporan	28 laporan	40%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	output : Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah	70 kegiatan					70 kegiatan	70 kegiatan	40%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Outcome : Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %					100 %	100 %	40%
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	output : Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	95 %					85 %	85 %	40%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	output : 1.Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50 laporan					10 laporan	10 laporan	40%
		: 2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	48 laporan					6 laporan	6 laporan	40%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	output : Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	122 laporan					14 laporan	14 laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	output : Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	40 laporan					10 laporan	10 laporan	40%
		: Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	74 laporan					10 laporan	10 laporan	40%
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	output : Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	95 %					85 %	85 %	40%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	output : Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	60 laporan					12 laporan	12 laporan	40%
		: Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi DBHCHT	60 laporan					24 laporan	24 laporan	40%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	output : Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	60 laporan					12 laporan	12 laporan	40%
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Outcome : Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100 %					100 %	100 %	40%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	output : Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	300					100 paket	100 paket	40%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	output : Jumlah Layanan Pada LPSE	21					7 jenis	7 jenis	40%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	output : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	6					2 kegiatan	2 kegiatan	40%
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Outcome : Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	80 %					80 %	80 %	40%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Output : Jumlah Buku Fasilitasi dan Buku Program Pembangunan yang disusun	3030 Buku					1010 Buku	1010 Buku	40%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Output : jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	2400 Paket					800 Paket	800 Paket	40%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Output : Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	600 Buku					200 Buku	200 Buku	40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan					100% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100% Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %					100 %	100 %	40%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	36 dokumen perencanaan setda					12 dokumen perencanaan setda	12 dokumen perencanaan setda	40%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	33 dokumen pelaporan setda					11 dokumen pelaporan setda	11 dokumen pelaporan setda	40%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Persentase terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah	300 %					100 %	100 %	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42 bulan					14 bulan	14 bulan	40%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	12 dokumen penatausahaan keuangan setda					4 dokumen penatausahaan keuangan setda	4 dokumen penatausahaan keuangan setda	40%
	Pemutakhiran Permendagri 90/2019									40%
	Kegiatan Penataan Organisasi	Outcome : Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %					100 %	100 %	40%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Output : Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	56 perangkat daerah					56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	40%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Output : Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan tatalaksana	65 unit kerja					65 unit kerja	65 unit kerja	40%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Output : Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 laporan					3 laporan	3 laporan	40%
	Pemutakhiran Permendagri 90/2019									40%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	: Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang terfasilitasi	438 orang					146 orang	146 orang	40%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	: Jumlah bimtek yang terlaksana	30 kali					10 kali	10 kali	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	: Jumlah laporan hasil sosialisasi yang dilaksanakan	24 Laporan					8 Laporan	8 Laporan	40%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	: Presentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	: Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	: Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	36 stel					12 stel	12 stel	40%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	: Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	: Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Jml rek tip, air, listrik dan internet yang terbayar	270 rek-bln					90 rek-bln	90 rek-bln	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	18 kegiatan					6 kegiatan	6 kegiatan	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 jenis					20 jenis	20 jenis	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	105 jenis					35 jenis	35 jenis	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	: Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	105 jenis					35 jenis	35 jenis	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	: Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	390 jenis					130 jenis	130 jenis	40%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	: Jumlah kegiatan rapat dan tamu	9000 orang					3000 orang	3000 orang	40%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1080 Laporan					360 Laporan	360 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	: Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	3 Unit					1 Unit	1 Unit	40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	39 Unit					13 Unit	13 Unit	40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	: Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	3 Unit					1 Unit	1 Unit	40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	15 unit					5 unit	5 unit	40%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	: Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	18 gedung					6 gedung	6 gedung	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	: Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	12 kendaraan					4 kendaraan	4 kendaraan	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	: Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	153 kendaraan					51 kendaraan	51 kendaraan	40%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	3600 unit					1200 unit	1200 unit	40%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara	150 unit					50 unit	50 unit	40%
	Pemeliharaan Mebel	: Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	360 unit					120 unit	120 unit	40%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	: Presentase pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	: Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	: Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 / 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 / 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1 / 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan n-1 / 2021	
					Target Renja PD Tahun n-2 / 2020	Realisasi Renja PD Tahun n-2 / 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 / 2021 (5+7+9=10)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10 / 4 = 11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	: Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia	36 bulan					12 bulan	12 bulan	40%
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	: Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	3					100%	100%	40%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	: Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	60 kegiatan					60 kegiatan	60 kegiatan	40%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	: Jumlah laporan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	24 acara					24 acara	24 acara	40%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	: Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	60 laporan					60 laporan	60 laporan	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai 2 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator kinerja sasaran :
 - a. Hasil Evaluasi atas LPPD
 - b. Nilai SAKIP Setda
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP minimal BB
 - d. Persentase OPD yang ber IKM sangat baik
 - e. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
 - f. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial yang difasilitasi
 - g. Persentase produk Kebijakan daerah yg diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah dengan indikator kinerja sasaran :
 - a. Persentase rata-rata ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah

Adapun capaian dari indikator tersebut di tahun 2020 dapat mencapai target yang ditetapkan bahkan ada yang melampaui target serta ada target yang belum dapat diketahuinya karena masih dalam proses penilaian. Hal ini dapat dilihat di pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang tersaji dalam tabel 2.2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator Tujuan Nilai SAKIP			80 (BB)				76,30 (BB)					Hasil belum dapat diketahui karena Masih dalam proses penilaian
	Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah Indikator Sasaran:												
	1.1 Hasil Evaluasi atas LPPD			≥ 3,1500 (sangat tinggi)	≥ 3,2000 (sangat tinggi)	≥ 3,2500 (sangat tinggi)	≥ 3,2750 (sangat tinggi)	Masih Dalam proses	Belum dilakukan Penilaian	≥ 3,2500 (sangat tinggi)	≥ 3,2750 (sangat tinggi)		Hasil belum dapat diketahui karena Masih dalam proses
	1.2 Nilai SAKIP Setda			81,50 (A)	83,00 (A)	85,00 (A)	87,00 (A)	83,70 (A)	Belum dilakukan Penilaian	85,00 (A)	87,00 (A)		Realisasi tahun 2020 Melampau target yang ditetapkan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1.3 Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP minimal BB			38%	43%	48%	53%	58,93%	43%	48%	53%	Realisasi tahun 2020 Melampau target yang ditetapkan
	1.4 Persentase OPD yang ber IKM minimal baik			100%	100%	100%	100%	83,97%	100%	100%	100%	Belum Tercapai
	1.5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement			91%	92%	93%	94%	136%	92%	93%	94%	Realisasi tahun 2020 Melampau target yang ditetapkan
	1.6 Persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	Belum dilakukan Penilaian	100%	100%	Tercapai
	1.7 Persentase produk Kebijakan Daerah yg diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah			92%	93%	95%	96%	98%	Belum dilakukan Penilaian	95%	96%	Realisasi tahun 2020 Melampau target yang ditetapkan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah											
	Indikator Sasaran:											
	2.1 Persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah			86%	87%	88%	90%	92,19%	Belum dilakukan Penilaian	88%	90%	Realisasi tahun 2020 Melampau target yang ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah selaku institusi yang merupakan unsur pendukung kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2022 diharapkan dapat di mencapai target yang ditetapkan sedangkan realisasi ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2020 dari 2 sasaran dan 7 target kinerja. 1 target masih dalam proses penilaian kemandagri, 2 target tercapai dan 4 target melampaui. Sedangkan Pada Tahun 2021 Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dari 2 sasaran dan 8 Target yang ditetapkan diharapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Pengertian masalah/hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan / hambatan yang terdapat di Sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang, kurangnya disiplin aparatur Sekretariat Daerah;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Belum tertatanya sistem administrasi dan kearsipan dengan baik sehingga menyebabkan pelayanan Sekretariat Daerah menjadi kurang efisien dan optimal;

- d. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dan pelayanan publik;
- e. Belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor yang dapat menghambat pembangunan daerah.
- f. Berubahnya peraturan/regulasi terkait SOTK Setda yang mempengaruhi proses penatausahaan keuangan.
- g. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan anggaran dan target program kegiatan dikarenakan refocusing anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid-19 tersebut.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/motivasi untuk melakukan/mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia/aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
- d. Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan yang strategis dan potensial;
- e. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- f. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.;
- g. Tertatanya kelembagaan pada Sekretariat Daerah yang mendukung terlaksananya tupoksi untuk mencapai target yang ditetapkan;
- h. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah dan dukungan dari kepala daerah yang mendukung peningkatan program pembangunan daerah.

4. Formulasi Isu-isu penting

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* dan dapat mengkoordinir dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan system serta SOP yang jelas dan transparan yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan dengan mudah.

- c. SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta system administrasi kepegawaian yang efektif untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- d. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan melalui koordinasi pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang potensi daerah dan sumber daya alam, koordinasi pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif, pengembangan BUMD, dan fasilitasi pemasaran potensi daerah serta produk-produk unggulan.
- e. Layanan pengadaan yang professional dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan Forum OPD sebagai titik awal perencanaan pembangunan di setiap OPD yang perlu diselaraskan dengan Rencana Strategis, tingkat kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta ketersediaan anggaran.

Rancangan awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 –2023 yang penyusunannya berdasarkan hasil rekapitulasi dari Renja OPD. RKPD sudah seharusnya mengakomodasi seluruh usulan OPD sebagai implementasi usulan dari masyarakat melalui musrenbang dan forum OPD sebagai wujud pelaksanaan anggaran kinerja.

Pada Sekretariat Daerah ada perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan yaitu penambahan sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan terkait pengelolaan dana cukai serta perubahan target capaian disesuaikan dengan analisis kebutuhan pada tahun yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kinerja pada tahun 2022 selain disusun berdasarkan program – program yang akan dilaksanakan, juga memperhatikan program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Kabupaten. Usulan program /kegiatan dari hasil musrenbang tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.4

TABEL 2.3
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp 26.253.861.710	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp 17.352.218.695	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Pasuruan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	100%	Rp 1.102.500.000	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Pasuruan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	100%	Rp 651.407.200	
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen LPPD	70 Buku	Rp 420.000.000	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen LPPD	70 Buku	Rp 281.717.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	12 Laporan	Rp 472.500.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	4 Laporan	Rp 265.400.200	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopimda	12 Laporan	Rp 210.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopimda	12 Laporan	Rp 104.290.000	
	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp 23.463.862.650	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp 15.317.097.100	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	35 Laporan	Rp 3.299.868.010	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	35 Laporan	Rp 2.987.397.100	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	688 Laporan	Rp 20.132.182.640	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	745 Laporan	Rp 12.240.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	15 Laporan	Rp 31.812.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	15 Laporan	Rp 89.700.000	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Pasuruan	Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	100%	Rp 1.319.999.060	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Pasuruan	Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	100%	Rp 1.197.714.360	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	800 produk hukum	Rp 425.011.200	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	800 produk hukum	Rp 399.368.380	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	28 laporan	Rp 421.837.660	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	28 laporan	Rp 377.194.840	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pasuruan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah	70 kegiatan	Rp 473.150.200	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pasuruan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum	70 kegiatan	Rp 421.151.140	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Rp 367.500.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Rp 186.000.035	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	12 laporan	Rp 198.187.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	12 laporan	Rp 129.138.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	2 laporan	Rp 40.162.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	2 laporan	Rp 12.342.935	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kerjasama	5 laporan	Rp 129.150.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi kerjasama	5 laporan	Rp 44.519.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Rp 3.730.825.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	Rp 8.815.957.500	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Pasuruan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	90%	Rp 1.064.825.000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Pasuruan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	90%	Rp 2.692.017.110	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pasuruan	1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 laporan	Rp 320.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pasuruan	1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 laporan	Rp 280.996.000	
		Kab. Pasuruan	2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	6 laporan			Kab. Pasuruan	2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	6 laporan		
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	12 laporan	Rp 480.825.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	14 laporan	Rp 2.174.301.110	
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 laporan	Rp 264.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 laporan	Rp 236.720.000	
		Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	10 laporan			Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	10 laporan		
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Pasuruan	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	80%	Rp 1.100.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Pasuruan	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	80%	Rp 850.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Pasuruan	Jumlah buku pedoman dan buku panduan teknis yang disusun	1100 buku	Rp 490.394.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Pasuruan	Jumlah Buku Fasilitasi dan Buku Program Pembangunan yang disusun	1100 buku	Rp 475.736.320	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pasuruan	Jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	800 paket	Rp 414.530.800	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pasuruan	jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	800 paket	Rp 196.122.970	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pasuruan	Jumlah buku pelaporan yang disusun	200 buku	Rp 195.074.700	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pasuruan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	200 buku	Rp 178.140.710	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%	Rp 1.450.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%	Rp 1.150.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	100 paket	Rp 955.062.500	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	100 paket	Rp 1.027.140.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan Pada LPSE	7 jenis	Rp 203.500.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah Layanan Pada LPSE	7 jenis	Rp 56.498.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	2 kegiatan	Rp 291.437.500	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pasuruan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	2 kegiatan	Rp 66.362.000	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Kab. Pasuruan	Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	90%	Rp 116.000.000	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Kab. Pasuruan	Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	90%	Rp 4.123.940.390	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12 laporan	Rp 32.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	12 laporan	Rp 27.746.000	
									Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi DBHCHT	24 laporan	Rp 4.028.056.390

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	12 laporan	Rp 84.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	12 laporan	Rp 68.138.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 35.194.674.239	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 34.967.172.310	
						Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	Rp 770.468.500	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan hasil sosialisasi yang dilaksanakan (DBHCHT)	12 laporan	Rp 770.468.500,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	Rp 54.093.900	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	Rp 54.093.900	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pasuruan	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang terfasilitasi	146 orang	Rp 6.093.900	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pasuruan	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang terfasilitasi	146 orang	Rp 6.093.900,00	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah bimtek yang terlaksana	10 kali	Rp 48.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah bimtek yang terlaksana	10 kali	Rp 48.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	Rp 1.478.026.181	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan operasional kepala daerah	100%	Rp 1.478.026.181	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 191.439.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 191.439.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	12 stel	Rp 106.902.400	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	12 stel	Rp 106.902.400,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 93.676.573	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Pelayanan Kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 93.676.573,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 1.086.008.208	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	12 bulan	Rp 1.086.008.208,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 3.482.185.519	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 3.686.996.519	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar	90 rek-bln	Rp 1.052.564.259	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar	90 rek-bln	Rp 1.052.564.259,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	6 kegiatan	Rp 137.095.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	6 kegiatan	Rp 137.095.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	12 bulan	Rp 2.292.526.260	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	12 bulan	Rp 2.497.337.260,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 2.576.271.661	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 2.576.270.661	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	20 jenis	Rp 306.948.040	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	20 jenis	Rp 306.948.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	35 jenis	Rp 131.955.300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	35 jenis	Rp 131.955.300	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	35 jenis	Rp 299.954.588	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	35 jenis	Rp 299.954.588	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	130 jenis	Rp 253.822.793	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	130 jenis	Rp 253.822.793	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	3000 orang	Rp 1.080.585.940	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	3000 orang	Rp 1.080.585.940	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	360 Laporan	Rp 503.005.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	360 Laporan	Rp 503.004.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 1.769.632.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	5 Unit	Rp 1.588.399.400	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	5 Unit	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	20 Unit	Rp 126.287.600	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	20 Unit	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	5 unit	Rp 8.195.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	5 unit	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	10 unit	Rp 46.750.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	10 unit	Rp -	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 2.854.615.334	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 3.186.617.875	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	6 gedung	Rp 536.497.734	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	6 gedung	Rp 687.263.875	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	4 kendaraan	Rp 233.506.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	4 kendaraan	Rp 264.743.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	55 kend	Rp 1.849.391.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	55 kend	Rp 1.999.391.200	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	1200 unit	Rp 134.037.800	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	1200 unit	Rp 134.037.800	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara	50 unit	Rp 78.742.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara	50 unit	Rp 78.742.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	120 unit	Rp 22.440.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	120 unit	Rp 22.440.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%	Rp 506.767.824	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Pasuruan	Presentase pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan	100%	Rp 506.767.824	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 259.863.624,00	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 259.863.624,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 194.215.872,00	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 194.215.872,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 52.688.328,00	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia	12 bulan	Rp 52.688.328,00	
	Kegiatan Penataan Organisasi	Kab. Pasuruan	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Rp 2.223.749.790	Kegiatan Penataan Organisasi	Kab. Pasuruan	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Rp 2.300.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	56 perangkat daerah	Rp 989.499.870	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	56 perangkat daerah	Rp 900.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pasuruan	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan ketatalaksana	65 unit kerja	Rp 767.399.940	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pasuruan	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan tatalaksana	65 unit kerja	Rp 500.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 laporan	Rp 466.849.980	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 laporan	Rp 500.000.000	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi	12 laporan	Rp 400.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasuruan	Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	100%	Rp 1.498.303.100	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasuruan	Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	100%	Rp 1.359.727.350	
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	60 laporan	Rp 946.652.300	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	60 laporan	Rp 748.794.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan fasilitas komunikasi pimpinan	24 Kegiatan	Rp 381.114.800	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan fasilitas komunikasi pimpinan	24 Kegiatan	Rp 418.428.350	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	60 laporan	Rp 170.536.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	60 laporan	Rp 192.505.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang terlaksana	100%	Rp 507.761.740	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	Rp 395.093.930	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	12 dokumen perencanaan setda	Rp 238.590.720,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	12 dokumen perencanaan setda	Rp 243.190.940	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	11 dokumen pelaporan setda	Rp 269.171.020,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	11 dokumen pelaporan setda	Rp 151.902.990	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah	100%	Rp 18.243.267.190	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat	100%	Rp 18.653.109.570	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Rp 16.751.029.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Rp 17.169.562.190	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	4 dokumen penatausahaan keuangan setda	Rp 1.492.238.190,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	4 dokumen penatausahaan keuangan setda	Rp 1.483.547.380	

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2022

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD				Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Bagian Hukum Setda
1.1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum		
1.1.1	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum	1. Desa Martopuro	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Bidang Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	1 kali	
		2. Desa Rowogempol		1 kali	
		3. Desa Watuprapat		1 kali	
		4. Desa Legok		1 kali	
		5. Desa Kepulungan		1 kali	
1.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat		Bagian Kesra Setda
1.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial	745 Titik di Wilayah Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	745 kali	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Sedangkan Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut beberapa telaah dan penyesuaian Pemerintah Daerah terhadap peraturan dan kebijakan Nasional:

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diundangkan pada 30 Desember 2020 dan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 membuat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, salah satunya adalah peran Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Hal tersebut juga dipertegas pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/2081/SJ tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penegasan Peran Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan .

Hal ini juga direspon searah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor 188/2/HK/424.013/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan/Penyesuaian Buku Pedoman APBD tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pengadaan Barang/Jasa

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 2 Pebruari 2021. Poin perubahan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 adalah Usaha Mikro Kecil, Koperasi dan

Produk Dalam Negeri, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) dan Kelembagaan, Pelaku Pengadaan, Jasa Konstruksi, Pembinaan Penyedia dan E-marketplace.

- Usaha Mikro Kecil, Koperasi dan Produk Dalam Negeri
 - Penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
 - Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Perangkat Daerah
 - Nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp 15.000.000.000 diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi
 - Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi
 - Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan katalog elektronik

- SDM PBJ dan Kelembagaan

Dalam perubahan ini, dikenalkan adanya SDM PBJ yaitu Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari:

- Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan didalamnya terdapat Pengelola PBJ (JF PPBJ) dan Personel Lainnya (Non-JF PPBJ). Kabupaten Pasuruan pada triwulan pertama ini telah berhasil menjaring 2 (dua) orang JF PPBJ (1 orang jenjang Pertama dan 1 orang jenjang Muda) dan telah dilakukan pengangkatan ke Kepala Daerah.

Oleh karena JF PPBJ Kabupaten Pasuruan masih belum terpenuhi seluruhnya, maka pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini juga selaras dengan surat jawaban permintaan saran/pendapat dari LKPP Nomor : 1786/D.4.2/2021 Tanggal 29 Januari 2021.

- Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/jasa yaitu SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan system PBJ
- Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJ yaitu SDM yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJ. Terkait Kelembagaan, terjadi penambahan persyaratan pada jabatan Kepala UKPBJ yaitu Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu dalam triwulan pertama ini, telah disusun dan direncanakan diklat kompetensi bagi Kepala BPBJ.

UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

- **Pelaku Pengadaan**
Pelaku Pengadaan terjadi perubahan pada kewenangan PA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP. Terkait hal ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan inisiasi Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 188/1/HK/424.013/2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1 Maret 2021.
- **Pembinaan Penyedia**
Pembinaan penyedia dilakukan oleh masing-masing sector usaha misalnya obat oleh Farmalkes Kemenkes dan BPOM, UMK oleh KemenkopUMK dan Jasa Konstruksi oleh Kementerian PUPR. Instrumen lain pembinaan pelaku usaha adalah bentuk/sifat sanksi daftar hitam yang juga mengalami perubahan dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021 ini.
- **Pemilihan Penyedia dalam Jasa Konstruksi**
 - Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi akan diatur oleh LKPP
 - Pengaturan akan digabungkan dalam kluster Peraturan LKPP tentang Pemilihan Penyedia
 - Diubahnya pengaturan terkait kontrak bagi Jasa Konstruksi
- **E-marketplace**
 - Penambahan tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring. Toko Dalam Jaringan selanjutnya disebut Toko Daring adalah system informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui system elektronik dan ritel daring
 - Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP

Kebijakan Perekonomian.

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan daerah memiliki peran sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat dan ekonomi kreatif termasuk didalamnya upaya mendukung fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yaitu percepatan pengembangan wilayah melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Hukum

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada, dan menjadi suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah, termasuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Salah satu telaah terhadap kebijakan nasional yang dapat menunjang kinerja Sekretariat Daerah adalah :

- a. Identifikasi analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan;
- b. Revisi peraturan perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang tidak harmonis/tidak sinkron

Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membuat Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 950/44 /HK/424.013/2021.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas sehingga diharapkan dengan adanya *road map* ini akan menuntun kepada terwujudnya perubahan yang diharapkan menuju reformasi birokrasi yang lebih baik yaitu bersih dan akuntabel, serta kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai perubahan reformasi birokrasi di 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, /deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Sekretariat Daerah dibuatlah rencana kerja/rencana aksi yang selaras dengan *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi secara berkala.

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Sekretariat daerah Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 adalah **" Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Sekretariat Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1 Hasil evaluasi atas LPPD	Nilai	≥3,2500 (sangat tinggi)
		1.2 Nilai SAKIP Setda	Skor	85,00
		1.3 Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik/Nilai SAKIP Minimal BB	%	48%
		1.4 Persentase OPD yang ber IKM minimal baik	%	100%
		1.5 Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	%	93%
		1.6 Persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	%	100%
		1.7 Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah	%	95%
		2. Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah	2.1 Persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah	%

3.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kepada Bupati dalam hal mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah didasarkan pada tugas dan fungsi tersebut yang disesuaikan berdasarkan pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050.3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2022, Sekretariat Daerah didukung oleh 3 program, 20 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 61.135.348.505,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN

Nama OPD : **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
01	Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH								
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 17.352.218.695,00	APBD		100%	Rp 18.393.351.816,70
4 01 02 2.01	1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%	651.407.200,00	APBD		100%	690.491.632,00
4 01 02 2.01 01	1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen LPPD	Kabupaten Pasuruan	70 Buku	Rp 281.717.000,00	APBD		70 Buku	Rp 298.620.020,00
					a. Belanja Operasi Rp 281.717.000,00			a. Belanja Operasi Rp 298.620.020,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 281.717.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 298.620.020,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.01 02	2 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	Rp 265.400.200,00	APBD		4 laporan	Rp 281.324.212,00
					a. Belanja Operasi Rp 265.400.200,00			a. Belanja Operasi Rp 281.324.212,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 265.400.200,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 281.324.212,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.01 03	3 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopimda	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Rp 104.290.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 110.547.400,00
					a. Belanja Operasi Rp 104.290.000,00			a. Belanja Operasi Rp 110.547.400,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 104.290.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 110.547.400,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.02	2 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	15.317.097.100,00	APBD	APBD	100%	16.236.122.926,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4 01 02 2.02 01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	Kabupaten Pasuruan	35 laporan	2.987.397.100,00	APBD	APBD	35 laporan	3.166.640.926,00
					a. Belanja Operasi Rp 2.987.397.100,00			a. Belanja Operasi Rp 3.166.640.926,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 2.987.397.100,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 3.166.640.926,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.02 02	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Pasuruan	745 laporan	12.240.000.000,00	APBD	APBD	745 laporan	12.974.400.000,00
					a. Belanja Operasi Rp 12.240.000.000,00			a. Belanja Operasi Rp 12.974.400.000,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 240.000.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 254.400.000,00	
					> Belanja Hibah Rp 12.000.000.000,00			> Belanja Hibah Rp 12.720.000.000,00	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.02 03	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Pasuruan	15 laporan	89.700.000,00	APBD	APBD	15 laporan	95.082.000,00
					a. Belanja Operasi Rp 89.700.000,00			a. Belanja Operasi Rp 95.082.000,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 89.700.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 95.082.000,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.03	3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 1.197.714.360,00	APBD	APBD	100%	Rp 1.269.577.221,60
4 01 02 2.03 01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	Kabupaten Pasuruan	800 produk hukum	399.368.380,00	APBD	APBD	800 produk hukum	423.330.482,80
					a. Belanja Operasi Rp 399.368.380,00			a. Belanja Operasi Rp 423.330.482,80	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 399.368.380,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 423.330.482,80	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4 01 02 2.03 02	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	Kabupaten Pasuruan	28 laporan	Rp 377.194.840,00	APBD	APBD	28 laporan	Rp 399.826.530,40
					a. Belanja Operasi Rp 377.194.840,00			a. Belanja Operasi Rp 399.826.530,40	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 377.194.840,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 399.826.530,40	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.03 03	3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah	Kabupaten Pasuruan	70 kegiatan	Rp 421.151.140,00	APBD	APBD	70 kegiatan	Rp 446.420.208,40
					a. Belanja Operasi Rp 421.151.140,00			a. Belanja Operasi Rp 446.420.208,40	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 421.151.140,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 446.420.208,40	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.04	4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 186.000.035	APBD		100%	Rp 197.160.037
4 01 02 2.04 01	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	Rp 129.138.000,00	APBD		12 laporan	Rp 136.886.280,00
					a. Belanja Operasi Rp 129.138.000,00			a. Belanja Operasi Rp 136.886.280,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 129.138.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 136.886.280,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.04 02	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	Kabupaten Pasuruan	2 laporan	Rp 12.342.935,00	APBD		2 laporan	Rp 13.083.511,10
					a. Belanja Operasi Rp 12.342.935,00			a. Belanja Operasi Rp 13.083.511,10	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 12.342.935,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 13.083.511,10	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
4 01 02 2.04 03	3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerjasama	Kabupaten Pasuruan	5 laporan	Rp 44.519.100,00	APBD		5 laporan	Rp 47.190.246,00
					a. Belanja Operasi Rp 44.519.100,00			a. Belanja Operasi Rp 47.190.246,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 44.519.100,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 47.190.246,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 8.815.957.500,00	APBD	100%	Rp 4.959.811.641,60	
5 01 03 2.01	1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	Rp 2.692.017.110,00	APBD	90%	Rp 2.853.538.136,60	
5 01 03 2.01 01	1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Pasuruan	10 laporan	Rp 280.996.000,00	APBD	10 laporan	Rp 297.855.760,00	
		2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	Kabupaten Pasuruan	6 laporan			6 laporan		
					a. Belanja Operasi Rp 280.996.000,00			a. Belanja Operasi Rp 297.855.760,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 280.996.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 297.855.760,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.01 02	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	14 laporan	Rp 2.174.301.110,00	DBHCHT	14 laporan	Rp 2.304.759.176,60	
					a. Belanja Operasi Rp 2.174.301.110,00			a. Belanja Operasi Rp 2.304.759.176,60	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 2.174.301.110,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 2.304.759.176,60	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.01 03	3 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan	Rp 236.720.000,00	APBD	10 Laporan	Rp 250.923.200,00	
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan			10 Laporan		
					a. Belanja Operasi Rp 236.720.000,00			a. Belanja Operasi Rp 250.923.200,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 236.720.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 250.923.200,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.02	2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	80%	Rp 850.000.000,00	APBD	80%	Rp 901.000.000,00	
5 01 03 2.02 01	1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku Fasilitas dan Buku Program Pembangunan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1010 Buku	Rp 475.736.320	APBD	1010 Buku	Rp 504.280.499	
					a. Belanja Operasi Rp 475.736.320			a. Belanja Operasi Rp 504.280.499	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 475.736.320			> Belanja Barang dan Jasa Rp 504.280.499,20	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.02 02	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	Kabupaten Pasuruan	800 Paket	Rp 196.122.970	APBD	800 Paket	Rp 207.890.348	
					a. Belanja Operasi Rp 196.122.970			a. Belanja Operasi Rp 207.890.348,20	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 196.122.970			> Belanja Barang dan Jasa Rp 207.890.348,20	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.02 03	3 Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	200 Buku	Rp 178.140.710	APBD	200 Buku	Rp 188.829.153	
					a. Belanja Operasi Rp 178.140.710			a. Belanja Operasi Rp 188.829.153	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 178.140.710			> Belanja Barang dan Jasa Rp 188.829.152,60	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
5 01 03 2.03	3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 1.150.000.000,00	APBD	100%	Rp 1.133.047.225,00	
5 01 03 2.03 01	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	Kabupaten Pasuruan	300 paket	Rp 1.027.140.000,00	APBD	300 paket	Rp 1.002.815.625,00	
					a. Belanja Operasi Rp 1.027.140.000,00			a. Belanja Operasi Rp 1.002.815.625,00	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.027.140.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.002.815.625,00	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5 01 03 2.03 02	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Pada LPSE	Kabupaten Pasuruan	7 jenis	Rp 56.498.000,00	APBD	7 jenis	Rp 59.887.880,00	
					a. Belanja Operasi Rp 56.498.000,00		a. Belanja Operasi Rp 59.887.880,00		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 56.498.000,00		> Belanja Barang dan Jasa Rp 59.887.880,00		
					> Belanja Hibah Rp -		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		d. Belanja Transfer Rp -		
5 01 03 2.03 03	3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Kabupaten Pasuruan	2 kegiatan	Rp 66.362.000,00	APBD	2 kegiatan	Rp 70.343.720,00	
					a. Belanja Operasi Rp 66.362.000,00		a. Belanja Operasi Rp 70.343.720,00		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 66.362.000,00		> Belanja Barang dan Jasa Rp 70.343.720,00		
					> Belanja Hibah Rp -		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		d. Belanja Transfer Rp -		
5 01 03 2.04	4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	Rp 4.123.940.390,00	APBD	90%	Rp 72.226.280,00	
5 01 03 2.04 01	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				Rp 4.055.802.390,00	APBD			
		Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	Rp 27.746.000,00		12 laporan	Rp 72.226.280,00	
					a. Belanja Operasi Rp 27.746.000,00		a. Belanja Operasi Rp 29.410.760,00		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 27.746.000,00		> Belanja Barang dan Jasa Rp 29.410.760,00		
					> Belanja Hibah Rp -		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		d. Belanja Transfer Rp -		
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	24 laporan	Rp 4.028.056.390,00		24 laporan	Rp 874.036.144,00	
					a. Belanja Operasi Rp 4.028.056.390,00		a. Belanja Operasi Rp 4.269.739.773,40		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 4.028.056.390,00		> Belanja Barang dan Jasa Rp 4.269.739.773,40		
					> Belanja Hibah Rp -		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		d. Belanja Transfer Rp -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5 01 03 2.04 03	2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	Rp 68.138.000,00	APBD	12 laporan	Rp 72.226.280,00	
					a. Belanja Operasi Rp 68.138.000,00		a. Belanja Operasi Rp 72.226.280,00		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 68.138.000,00		> Belanja Barang dan Jasa Rp 72.226.280,00		
					> Belanja Hibah		> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		d. Belanja Transfer		
XX X 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 34.967.172.310,00	APBD		Rp 15.856.795.947,60	
XX X 01 2.05	1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 770.468.500,00	APBD	100%	Rp 874.036.144,00	
	1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan hasil sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Rp 770.468.500,00	APBD	12 Laporan	Rp 816.696.610,00	
					a. Belanja Operasi Rp 770.468.500		a. Belanja Operasi Rp 816.696.610		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 770.468.500		> Belanja Barang dan Jasa Rp 816.696.610,00		
					> Belanja Hibah		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer		d. Belanja Transfer Rp -		
XX X 01 2.05	2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 54.093.900,00	APBD	100%	Rp 57.339.534,00	
XX X 01 2.05 05	1. Sub Kegiatan Monitoring,	Jumlah administrasi	Kabupaten	146 orang	Rp 6.093.900,00	APBD	146 orang	Rp 6.459.534,00	
					a. Belanja Operasi Rp 6.093.900		a. Belanja Operasi Rp 6.459.534		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 6.093.900		> Belanja Barang dan Jasa Rp 6.459.534,00		
					> Belanja Hibah Rp -		> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		d. Belanja Transfer Rp -		
XX X 01 2.05 11	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang terlaksana	Kabupaten Pasuruan	10 kali	Rp 48.000.000,00	APBD	10 kali	Rp 50.880.000,00	
					a. Belanja Operasi Rp 48.000.000		a. Belanja Operasi Rp 50.880.000		
					> Belanja Pegawai Rp -		> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 48.000.000		> Belanja Barang dan Jasa Rp 50.880.000,00		
					> Belanja Hibah		> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		d. Belanja Transfer		
XX X 01 2.05	3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	RTH Bupati dan Wabup	100%	Rp 1.478.026.181,00	APBD	100%	Rp 1.566.707.751,86	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
XX	X	01	2.05	01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 191.439.000,00	APBD		12 bulan	Rp 202.925.340,00		
									a. Belanja Operasi	Rp	191.439.000		a. Belanja Operasi	Rp	202.925.340
									> Belanja Pegawai	Rp	191.439.000		> Belanja Pegawai	Rp	202.925.340,00
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp	-		> Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
									> Belanja Hibah	Rp	-		> Belanja Hibah	Rp	-
									b. Belanja Modal	Rp	-		b. Belanja Modal	Rp	-
									c. Belanja Tidak terduga	Rp	-		c. Belanja Tidak terduga	Rp	-
									d. Belanja Transfer	Rp	-		d. Belanja Transfer	Rp	-
XX	X	01	2.05	02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 106.902.400,00	APBD		12 bulan	Rp 113.316.544,00		
									a. Belanja Operasi	Rp	106.902.400		a. Belanja Operasi	Rp	113.316.544
									> Belanja Pegawai	Rp	-		> Belanja Pegawai	Rp	-
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp	106.902.400		> Belanja Barang dan Jasa	Rp	113.316.544,00
									> Belanja Hibah	Rp	-		> Belanja Hibah	Rp	-
									b. Belanja Modal	Rp	-		b. Belanja Modal	Rp	-
									c. Belanja Tidak terduga	Rp	-		c. Belanja Tidak terduga	Rp	-
									d. Belanja Transfer	Rp	-		d. Belanja Transfer	Rp	-
XX	X	01	2.05	03	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 93.676.573,00	APBD		12 bulan	Rp 99.297.167,38		
									a. Belanja Operasi	Rp	93.676.573		a. Belanja Operasi	Rp	99.297.167
									> Belanja Pegawai	Rp	-		> Belanja Pegawai	Rp	-
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp	93.676.573		> Belanja Barang dan Jasa	Rp	99.297.167,38
									> Belanja Hibah	Rp	-		> Belanja Hibah	Rp	-
									b. Belanja Modal	Rp	-		b. Belanja Modal	Rp	-
									c. Belanja Tidak terduga	Rp	-		c. Belanja Tidak terduga	Rp	-
									d. Belanja Transfer	Rp	-		d. Belanja Transfer	Rp	-
XX	X	01	2.05	04	4. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 1.086.008.208,00	APBD		12 bulan	Rp 1.151.168.700,48		
									a. Belanja Operasi	Rp	1.086.008.208		a. Belanja Operasi	Rp	1.151.168.700
									> Belanja Pegawai	Rp	1.086.008.208		> Belanja Pegawai	Rp	1.151.168.700,48
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp	-		> Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
									> Belanja Hibah	Rp	-		> Belanja Hibah	Rp	-
									b. Belanja Modal	Rp	-		b. Belanja Modal	Rp	-
									c. Belanja Tidak terduga	Rp	-		c. Belanja Tidak terduga	Rp	-
									d. Belanja Transfer	Rp	-		d. Belanja Transfer	Rp	-
XX	X	01	2.08		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 3.686.996.519,00	APBD		12 bulan	Rp 3.908.216.310,14		
XX	X	01	2.08	02	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar	Sekretariat Daerah	90 rek-bln	Rp 1.052.564.259,00	APBD		90 rek-bln	Rp 1.115.718.114,54		
									a. Belanja Operasi	Rp	1.052.564.259		a. Belanja Operasi	Rp	1.115.718.115
									> Belanja Pegawai	Rp	-		> Belanja Pegawai	Rp	-
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.052.564.259		> Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.115.718.114,54
									> Belanja Hibah	Rp	-		> Belanja Hibah	Rp	-
									b. Belanja Modal	Rp	-		b. Belanja Modal	Rp	-
									c. Belanja Tidak terduga	Rp	-		c. Belanja Tidak terduga	Rp	-
									d. Belanja Transfer	Rp	-		d. Belanja Transfer	Rp	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
XX	X	01	2.08	03	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	6 kegiatan	Rp 137.095.000,00	APBD		6 kegiatan	Rp 145.320.700,00
								a. Belanja Operasi Rp 137.095.000				a. Belanja Operasi Rp 145.320.700	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 137.095.000				> Belanja Barang dan Jasa Rp 145.320.700,00	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.08	04	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbavarkan	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 2.497.337.260,00	APBD		12 bulan	Rp 2.647.177.495,60
								a. Belanja Operasi Rp 2.497.337.260				a. Belanja Operasi Rp 2.647.177.496	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 2.497.337.260				> Belanja Barang dan Jasa Rp 2.647.177.495,60	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.06		5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 2.576.270.661,00	APBD		100%	Rp 2.730.846.900,66
XX	X	01	2.06	05	1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sekretariat Daerah	20 jenis	Rp 306.948.040,00	APBD		20 jenis	Rp 325.364.922,40
								a. Belanja Operasi Rp 306.948.040				a. Belanja Operasi Rp 325.364.922	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 306.948.040				> Belanja Barang dan Jasa Rp 325.364.922,40	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.06	02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	35 jenis	Rp 131.955.300,00	APBD		35 jenis	Rp 139.872.618,00
								a. Belanja Operasi Rp 131.955.300				a. Belanja Operasi Rp 139.872.618	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 131.955.300				> Belanja Barang dan Jasa Rp 139.872.618,00	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.06	03	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah	35 jenis	Rp 299.954.588,00	APBD		35 jenis	Rp 317.951.863,28
								a. Belanja Operasi Rp 299.954.588				a. Belanja Operasi Rp 317.951.863	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 299.954.588				> Belanja Barang dan Jasa Rp 317.951.863,28	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.06	04	4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Sekretariat Daerah	130 jenis	Rp 253.822.793,00	APBD		130 jenis	Rp 269.052.160,58
								a. Belanja Operasi Rp 253.822.793				a. Belanja Operasi Rp 269.052.161	
								> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 253.822.793				> Belanja Barang dan Jasa Rp 269.052.160,58	
								> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									d. Belanja Transfer				d. Belanja Transfer
XX	X	01	2.06	08	5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Sekretariat Daerah	3000 orang	Rp 1.080.585.940,00	APBD		3000 orang	Rp 1.145.421.096,40
									a. Belanja Operasi Rp 1.080.585.940				a. Belanja Operasi Rp 1.145.421.096
									> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.080.585.940				> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.145.421.096,40
									> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -
									b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -
									c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -
									d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -
XX	X	01	2.06	09	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah	360 Laporan	Rp 503.004.000,00	APBD		360 Laporan	Rp 533.184.240,00
									a. Belanja Operasi Rp 503.004.000				a. Belanja Operasi Rp 533.184.240
									> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 503.004.000				> Belanja Barang dan Jasa Rp 533.184.240,00
									> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -
									b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -
									c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -
									d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -
XX	X	01	2.07		6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp -	APBD		100%	Rp -
XX	X	01	2.07	02	1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	Sekretariat Daerah	5 unit	Rp -	APBD		5 unit	Rp -
									a. Belanja Operasi Rp -				a. Belanja Operasi Rp -
									> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa Rp -				> Belanja Barang dan Jasa Rp -
									> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -
									b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -
									c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -
									d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -
XX	X	01	2.07	10	2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	Sekretariat Daerah	20 unit	Rp -	APBD		20 unit	Rp -
									a. Belanja Operasi Rp -				a. Belanja Operasi Rp -
									> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa Rp -				> Belanja Barang dan Jasa Rp -
									> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -
									b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -
									c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -
									d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -
XX	X	01	2.07	05	3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	Sekretariat Daerah	5 unit	Rp -	APBD		5 unit	Rp -
									a. Belanja Operasi Rp -				a. Belanja Operasi Rp -
									> Belanja Pegawai Rp -				> Belanja Pegawai Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa Rp -				> Belanja Barang dan Jasa Rp -
									> Belanja Hibah Rp -				> Belanja Hibah Rp -
									b. Belanja Modal Rp -				b. Belanja Modal Rp -
									c. Belanja Tidak terduga Rp -				c. Belanja Tidak terduga Rp -
									d. Belanja Transfer Rp -				d. Belanja Transfer Rp -

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
XX	X	01	2.07	11	4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	10 unit	Rp -	APBD		10 unit	Rp -
								a. Belanja Operasi	Rp -			a. Belanja Operasi	Rp -
								> Belanja Pegawai	Rp -			> Belanja Pegawai	Rp -
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp -			> Belanja Barang dan Jasa	Rp -
								> Belanja Hibah	Rp -			> Belanja Hibah	Rp -
								b. Belanja Modal	Rp -			b. Belanja Modal	Rp -
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -			c. Belanja Tidak terduga	Rp -
								d. Belanja Transfer	Rp -			d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.09		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 3.186.617.875,00	APBD		100%	Rp 3.377.814.947,50
XX	X	01	2.09	09	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	Sekretariat Daerah	6 gedung	Rp 687.263.875,00	APBD		6 gedung	Rp 728.499.707,50
								a. Belanja Operasi	Rp 687.263.875			a. Belanja Operasi	Rp 728.499.708
								> Belanja Pegawai	Rp -			> Belanja Pegawai	Rp -
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 687.263.875			> Belanja Barang dan Jasa	Rp 728.499.707,50
								> Belanja Hibah	Rp -			> Belanja Hibah	Rp -
								b. Belanja Modal	Rp -			b. Belanja Modal	Rp -
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -			c. Belanja Tidak terduga	Rp -
								d. Belanja Transfer	Rp -			d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.09	01	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Sekretariat Daerah	4 kendaraan	Rp 264.743.000,00	APBD		4 kendaraan	Rp 280.627.580,00
								a. Belanja Operasi	Rp 264.743.000			a. Belanja Operasi	Rp 280.627.580
								> Belanja Pegawai	Rp -			> Belanja Pegawai	Rp -
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 264.743.000			> Belanja Barang dan Jasa	Rp 280.627.580,00
								> Belanja Hibah	Rp -			> Belanja Hibah	Rp -
								b. Belanja Modal	Rp -			b. Belanja Modal	Rp -
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -			c. Belanja Tidak terduga	Rp -
								d. Belanja Transfer	Rp -			d. Belanja Transfer	Rp -
X	XX	01	2.09	02	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	Sekretariat Daerah	55 kend	Rp 1.999.391.200,00	APBD		55 kend	Rp 2.119.354.672,00
								a. Belanja Operasi	Rp 1.999.391.200			a. Belanja Operasi	Rp 2.119.354.672
								> Belanja Pegawai	Rp -			> Belanja Pegawai	Rp -
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.999.391.200			> Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.119.354.672,00
								> Belanja Hibah	Rp -			> Belanja Hibah	Rp -
								b. Belanja Modal	Rp -			b. Belanja Modal	Rp -
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -			c. Belanja Tidak terduga	Rp -
								d. Belanja Transfer	Rp -			d. Belanja Transfer	Rp -
X	XX	01	2.09	10	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat Daerah	1200 unit	Rp 134.037.800,00	APBD		1200 unit	Rp 142.080.068,00
								a. Belanja Operasi	Rp 134.037.800			a. Belanja Operasi	Rp 142.080.068
								> Belanja Pegawai	Rp -			> Belanja Pegawai	Rp -

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 134.037.800			> Belanja Barang dan Jasa Rp 142.080.068,00	
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.09 11	5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah	50 unit	Rp 78.742.000,00	APBD	50 unit	Rp 83.466.520,00	
					a. Belanja Operasi Rp 78.742.000			a. Belanja Operasi Rp 83.466.520	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 78.742.000			> Belanja Barang dan Jasa Rp 83.466.520,00	
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.09 05	6. Pemeliharaan Mebel	Sekretariat Daerah	120 unit	Rp 22.440.000,00	APBD	120 unit	Rp 23.786.400,00	
					a. Belanja Operasi Rp 22.440.000			a. Belanja Operasi Rp 23.786.400	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 22.440.000			> Belanja Barang dan Jasa Rp 23.786.400,00	
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.12	8. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 506.767.824,00	APBD	100%	Rp 537.173.893,44	
X	XX 01 2.12 01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 259.863.624,00	APBD	12 bulan	Rp 275.455.441,44	
					a. Belanja Operasi Rp 259.863.624			a. Belanja Operasi Rp 275.455.441	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 259.863.624			> Belanja Barang dan Jasa Rp 275.455.441,44	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
X	XX 01 2.12 02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 194.215.872,00	APBD	12 bulan	Rp 205.868.824,32	
					a. Belanja Operasi Rp 194.215.872			a. Belanja Operasi Rp 205.868.824	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 194.215.872			> Belanja Barang dan Jasa Rp 205.868.824,32	
					> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -	
					b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -	
					d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -	
X	XX 01 2.12 03	3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 52.688.328,00	APBD	12 bulan	Rp 55.849.627,68	
					a. Belanja Operasi Rp 52.688.328			a. Belanja Operasi Rp 55.849.628	
					> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 52.688.328			> Belanja Barang dan Jasa Rp 55.849.627,68	
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer			b. Belanja Modal c. Belanja Tidak terduga d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.12	9. Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 2.300.000.000,00	APBD	100%	Rp 2.438.000.000,00
X	XX 01 2.12 01	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Kabupaten Pasuruan	56 Perangkat daerah	Rp 900.000.000,00	APBD	56 Perangkat daerah	Rp 954.000.000,00
						a. Belanja Operasi Rp 900.000.000,00			a. Belanja Operasi Rp 954.000.000,00
						> Belanja Pegawai Rp 1.029.000,00			> Belanja Pegawai Rp 1.090.740,00
						> Belanja Barang dan Jasa Rp 898.971.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 952.909.260,00
						> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -
						b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -
						c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -
						d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -
X	XX 01 2.12 02	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan tatalaksana	Kabupaten Pasuruan	65 unit kerja	Rp 500.000.000,00	APBD	65 unit kerja	Rp 530.000.000,00
						a. Belanja Operasi			a. Belanja Operasi
						> Belanja Pegawai Rp 500.000.000,00			> Belanja Pegawai Rp 530.000.000,00
						> Belanja Barang dan Jasa Rp 730.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 773.800,00
						> Belanja Hibah Rp 499.270.000,00			> Belanja Hibah Rp 529.226.200,00
						b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -
						c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -
						d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -
X	XX 01 2.12 03	3. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	3 laporan	Rp 500.000.000,00	APBD	3 laporan	Rp 530.000.000,00
						a. Belanja Operasi Rp 500.000.000,00			a. Belanja Operasi Rp 530.000.000,00
						> Belanja Pegawai Rp 365.000,00			> Belanja Pegawai Rp 386.900,00
						> Belanja Barang dan Jasa Rp 499.635.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 529.613.100,00
						> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -
						b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -
						c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -
						d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -
X	XX 01 2.12 04	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Koordinasi	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	Rp 400.000.000,00	APBD	12 laporan	Rp 424.000.000,00
						a. Belanja Operasi Rp 400.000.000,00			a. Belanja Operasi Rp 424.000.000,00
						> Belanja Pegawai Rp -			> Belanja Pegawai Rp -
						> Belanja Barang dan Jasa Rp 400.000.000,00			> Belanja Barang dan Jasa Rp 424.000.000,00
						> Belanja Hibah Rp -			> Belanja Hibah Rp -
						b. Belanja Modal Rp -			b. Belanja Modal Rp -
						c. Belanja Tidak terduga Rp -			c. Belanja Tidak terduga Rp -
						d. Belanja Transfer Rp -			d. Belanja Transfer Rp -

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X	XX	01	2.14		10 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	100%	1.359.727.350,00	APBD	100%	1.441.310.991,00
X	XX	01	2.14	01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	748.794.000,00	APBD	60 Kegiatan	793.721.640,00
									a. Belanja Operasi			793.721.640,00
									> Belanja Pegawai			0,00
									> Belanja Barang dan Jasa			Rp 793.721.640,00
									> Belanja Hibah			
									b. Belanja Modal			
									c. Belanja Tidak terduga			
									d. Belanja Transfer			
X	XX	01	2.14	02	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	24 Kegiatan	418.428.350,00	APBD	24 Kegiatan	443.534.051,00
									a. Belanja Operasi			443.534.051,00
									> Belanja Pegawai			
									> Belanja Barang dan Jasa			Rp 443.534.051,00
									> Belanja Hibah			
									b. Belanja Modal			
									c. Belanja Tidak terduga			
									d. Belanja Transfer			
X	XX	01	2.14	03	3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	192.505.000,00	APBD	60 Kegiatan	204.055.300,00
									a. Belanja Operasi			204.055.300,00
									> Belanja Pegawai			
									> Belanja Barang dan Jasa			Rp 204.055.300,00
									> Belanja Hibah			
									b. Belanja Modal			
									c. Belanja Tidak terduga			
									d. Belanja Transfer			
X	XX	01	2.01		11 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	395.093.930,00	APBD	100%	418.799.565,80
X	XX	01	2.01	01	1. Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah Dokumen	Sekretariat Daerah	12 dokumen	243.190.940,00	APBD	12 dokumen	257.782.396,40
									a. Belanja Operasi			257.782.396,40
									> Belanja Pegawai			
									> Belanja Barang dan Jasa			Rp 257.782.396,40
									> Belanja Hibah			
									b. Belanja Modal			
									c. Belanja Tidak terduga			
									d. Belanja Transfer			
X	XX	01	2.01	06	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Sekretariat Daerah	11 dokumen pelaporan setda	151.902.990,00	APBD	11 dokumen pelaporan setda	161.017.169,40
									a. Belanja Operasi			161.017.169,40
									> Belanja Pegawai			
									> Belanja Barang dan Jasa			Rp 161.017.169,40
									> Belanja Hibah			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagn Indikatif
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.01	12 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	18.653.109.570,00	APBD	100%	19.772.296.144,20	
X	XX 01 2.01 01	1. Sub Kegiatan Penvediaan Gaji dan	Jumlah pembavaran Gaji	Sekretariat Daerah	14 bulan	17.169.562.190,00	APBD	14 bulan	18.199.735.921,40
					a. Belanja Operasi	17.169.562.190,00		a. Belanja Operasi	18.199.735.921,40
					> Belanja Pegawai	17.169.562.190,00		> Belanja Pegawai	Rp 18.199.735.921,40
					> Belanja Barang dan Jasa			> Belanja Barang dan Jasa	
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
X	XX 01 2.01 03	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Sekretariat Daerah	4 dokumen	1.483.547.380,00	APBD	4 dokumen	1.572.560.222,80
					a. Belanja Operasi	1.483.547.380,00		a. Belanja Operasi	1.572.560.222,80
					> Belanja Pegawai	1.196.809.500,00		> Belanja Pegawai	Rp 1.268.618.070,00
					> Belanja Barang dan Jasa	286.737.880,00		> Belanja Barang dan Jasa	Rp 303.942.152,80
					> Belanja Hibah			> Belanja Hibah	
					b. Belanja Modal			b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga			c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer			d. Belanja Transfer	
					TOTAL BELANJA	61.135.348.505,00			Rp 64.803.469.415,30

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 maka harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar sub bagian. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan perencanaan, koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan dalam program-program harus berkesinambungan sehingga bisa mencapai target rencana kerja satu tahun.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, maka evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program dan kegiatan tahap berikutnya.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Nama OPD : **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Urusan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
01	Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 17.352.218.695,00	APBD
4 01 02 2.01	1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%	651.407.200,00	APBD
4 01 02 2.01 01	1. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen LPPD	Kabupaten Pasuruan	70 Buku	Rp 281.717.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 281.717.000,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 281.717.000,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -
4 01 02 2.01 02	2 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	Rp 265.400.200,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 265.400.200,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 265.400.200,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -
4 01 02 2.01 03	3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopinda	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Rp 104.290.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 104.290.000,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 104.290.000,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -
4 01 02 2.02	2 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	15.317.097.100,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
4	01	02	2.02	01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	Kabupaten Pasuruan	35 laporan	Rp 2.987.397.100,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 2.987.397.100,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.987.397.100,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
4	01	02	2.02	02	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Pasuruan	745 laporan	Rp 12.240.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 12.240.000.000,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 240.000.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp 12.000.000.000,00	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
4	01	02	2.02	03	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Pasuruan	15 laporan	Rp 89.700.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 89.700.000,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 89.700.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
4	01	02	2.03	3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 1.197.714.360,00	APBD
4	01	02	2.03	01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	Kabupaten Pasuruan	800 produk hukum	Rp 399.368.380,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 399.368.380,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 399.368.380,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
4	01	02	2.03	02	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	Kabupaten Pasuruan	28 laporan	Rp 377.194.840,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 377.194.840,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 377.194.840,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
4 01 02 2.03 03	3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah	Kabupaten Pasuruan	70 kegiatan		Rp 421.151.140,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 421.151.140,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 421.151.140,00	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
4 01 02 2.04	4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%		Rp 186.000.035	APBD
4 01 02 2.04 01	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	Kabupaten Pasuruan	12 laporan		Rp 129.138.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 129.138.000,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 129.138.000,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
4 01 02 2.04 02	2 Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	Kabupaten Pasuruan	2 laporan		Rp 12.342.935,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 12.342.935,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.342.935,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
4 01 02 2.04 03	3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerjasama	Kabupaten Pasuruan	5 laporan		Rp 44.519.100,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 44.519.100,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 44.519.100,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
					b. Belanja Modal	
					c. Belanja Tidak terduga	
					d. Belanja Transfer	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 8.815.957.500,00	APBD
5 01 03 2.01	1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	Rp 2.692.017.110,00	APBD
5 01 03 2.01 01	1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Pasuruan	10 laporan	Rp 280.996.000,00	APBD
		2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	Kabupaten Pasuruan	6 laporan		
					a. Belanja Operasi	Rp 280.996.000,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 280.996.000,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -
5 01 03 2.01 02	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	14 laporan	Rp 2.174.301.110,00	DBHCHT
					a. Belanja Operasi	Rp 2.174.301.110,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.174.301.110,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -
5 01 03 2.01 03	3 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan	Rp 236.720.000,00	APBD
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan		
					a. Belanja Operasi	Rp 236.720.000,00
					> Belanja Pegawai	Rp -
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 236.720.000,00
					> Belanja Hibah	Rp -
					b. Belanja Modal	Rp -
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -
					d. Belanja Transfer	Rp -

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
5	01	03	2.02		2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	80%	Rp 850.000.000,00	APBD
5	01	03	2.02	01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku Fasilitasi dan Buku Program Pembangunan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1010 Buku	Rp 475.736.320	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 475.736.320	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 475.736.320	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	
									c. Belanja Tidak terduga Rp -	
									d. Belanja Transfer Rp -	
5	01	03	2.02	02	2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	Kabupaten Pasuruan	800 Paket	Rp 196.122.970	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 196.122.970	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 196.122.970	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	
									c. Belanja Tidak terduga Rp -	
									d. Belanja Transfer Rp -	
5	01	03	2.02	03	3 Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	200 Buku	Rp 178.140.710	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 178.140.710	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 178.140.710	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	
									c. Belanja Tidak terduga Rp -	
									d. Belanja Transfer Rp -	
5	01	03	2.03		3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 1.150.000.000,00	APBD
5	01	03	2.03	01	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	Kabupaten Pasuruan	300 paket	Rp 1.027.140.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 1.027.140.000,00	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.027.140.000,00	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	
									c. Belanja Tidak terduga Rp -	
									d. Belanja Transfer Rp -	
5	01	03	2.03	02	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Pada LPSE	Kabupaten Pasuruan	7 jenis	Rp 56.498.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 56.498.000,00	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 56.498.000,00	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
5 01 03 2.03 03	3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Kabupaten Pasuruan	2 kegiatan		Rp 66.362.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 66.362.000,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 66.362.000,00	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
5 01 03 2.04	4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%		Rp 4.123.940.390,00	APBD
5 01 03 2.04 01	1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					Rp 4.055.802.390,00	APBD
		Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Pasuruan	12 laporan		Rp 27.746.000,00	
					a. Belanja Operasi	Rp 27.746.000,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 27.746.000,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	24 laporan		Rp 4.028.056.390,00	
					a. Belanja Operasi	Rp 4.028.056.390,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.028.056.390,00	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	
5 01 03 2.04 03	2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	Kabupaten Pasuruan	12 laporan		Rp 68.138.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 68.138.000,00	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 68.138.000,00	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
XX	X	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 34.967.172.310,00	APBD
XX	X	01	2.05	1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 770.468.500,00	APBD
				1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan hasil sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	Rp 770.468.500,00	APBD
								a. Belanja Operasi Rp 770.468.500	
								> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 770.468.500	
								> Belanja Hibah	
								b. Belanja Modal	
								c. Belanja Tidak terduga	
								d. Belanja Transfer	
XX	X	01	2.05	2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 54.093.900,00	APBD
XX	X	01	2.05	05 1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pasuruan	146 orang	Rp 6.093.900,00	APBD
								a. Belanja Operasi Rp 6.093.900	
								> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 6.093.900	
								> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -	
XX	X	01	2.05	11 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang terlaksana	Kabupaten Pasuruan	10 kali	Rp 48.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi Rp 48.000.000	
								> Belanja Pegawai Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp 48.000.000	
								> Belanja Hibah	
								b. Belanja Modal	
								c. Belanja Tidak terduga	
								d. Belanja Transfer	
XX	X	01	2.05	3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	RTK Bupati dan Wabup	100%	Rp 1.478.026.181,00	APBD
XX	X	01	2.05	01 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 191.439.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi Rp 191.439.000	
								> Belanja Pegawai Rp 191.439.000	
								> Belanja Barang dan Jasa Rp -	
								> Belanja Hibah Rp -	
								b. Belanja Modal Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga Rp -	
								d. Belanja Transfer Rp -	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
XX	X	01	2.05	02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 106.902.400,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 106.902.400
									> Belanja Pegawai	Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp 106.902.400
									> Belanja Hibah	Rp -
									b. Belanja Modal	Rp -
									c. Belanja Tidak terduga	Rp -
									d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.05	03	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 93.676.573,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 93.676.573
									> Belanja Pegawai	Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp 93.676.573
									> Belanja Hibah	Rp -
									b. Belanja Modal	Rp -
									c. Belanja Tidak terduga	Rp -
									d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.05	04	4. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 1.086.008.208,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 1.086.008.208
									> Belanja Pegawai	Rp 1.086.008.208
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp -
									> Belanja Hibah	Rp -
									b. Belanja Modal	Rp -
									c. Belanja Tidak terduga	Rp -
									d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.08		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	Rp 3.686.996.519,00	APBD
XX	X	01	2.08	02	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar	Sekretariat Daerah	90 rek-bln	Rp 1.052.564.259,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 1.052.564.259
									> Belanja Pegawai	Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.052.564.259
									> Belanja Hibah	Rp -
									b. Belanja Modal	Rp -
									c. Belanja Tidak terduga	Rp -
									d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.08	03	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	6 kegiatan	Rp 137.095.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 137.095.000
									> Belanja Pegawai	Rp -
									> Belanja Barang dan Jasa	Rp 137.095.000
									> Belanja Hibah	Rp -
									b. Belanja Modal	Rp -
									c. Belanja Tidak terduga	Rp -
									d. Belanja Transfer	Rp -
XX	X	01	2.08	04	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 2.497.337.260,00	APBD
									a. Belanja Operasi	Rp 2.497.337.260

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.497.337.260	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
XX	X 01 2.06	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 2.576.270.661,00	APBD
XX	X 01 2.06 05	1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sekretariat Daerah	20 jenis	Rp 306.948.040,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 306.948.040	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 306.948.040	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
XX	X 01 2.06 02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	35 jenis	Rp 131.955.300,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 131.955.300	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 131.955.300	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
XX	X 01 2.06 03	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah	35 jenis	Rp 299.954.588,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 299.954.588	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 299.954.588	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
XX	X 01 2.06 04	4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Sekretariat Daerah	130 jenis	Rp 253.822.793,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 253.822.793	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 253.822.793	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
XX	X 01 2.06 08	5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Sekretariat Daerah	3000 orang	Rp 1.080.585.940,00	APBD
					a. Belanja Operasi	Rp 1.080.585.940	
					> Belanja Pegawai	Rp -	
					> Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.080.585.940	
					> Belanja Hibah	Rp -	
					b. Belanja Modal	Rp -	
					c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
					d. Belanja Transfer	Rp -	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
XX	X	01	2.06	09	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah	360 Laporan	Rp 503.004.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 503.004.000	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 503.004.000	
								> Belanja Hibah		
								b. Belanja Modal		
								c. Belanja Tidak terduga		
								d. Belanja Transfer		
XX	X	01	2.07		6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp -	APBD
XX	X	01	2.07	02	1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	Sekretariat Daerah	5 unit	Rp -	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp -	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
XX	X	01	2.07	10	2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	Sekretariat Daerah	20 unit	Rp -	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp -	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
XX	X	01	2.07	05	3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	Sekretariat Daerah	5 unit	Rp -	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp -	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
XX	X	01	2.07	11	4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	10 unit	Rp -	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp -	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp -	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
XX	X	01	2.09		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 3.186.617.875,00	APBD
XX	X	01	2.09	09	1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	Sekretariat Daerah	6 gedung	Rp 687.263.875,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 687.263.875	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 687.263.875	
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
XX	X	01	2.09	01	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Sekretariat Daerah	4 kendaraan	Rp 264.743.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 264.743.000	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 264.743.000	
									> Belanja Hibah Rp -	
									b. Belanja Modal Rp -	
									c. Belanja Tidak terduga Rp -	
									d. Belanja Transfer Rp -	
X	XX	01	2.09	02	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	Sekretariat Daerah	55 kend	Rp 1.999.391.200,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 1.999.391.200	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 1.999.391.200	
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.09	10	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat Daerah	1200 unit	Rp 134.037.800,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 134.037.800	
									> Belanja Pegawai Rp -	
									> Belanja Barang dan Jasa Rp 134.037.800	
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.09	11	5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara	Sekretariat Daerah	50 unit	Rp 78.742.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi Rp 78.742.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 78.742.000		
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
X	XX 01 2.09 05	6. Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	Sekretariat Daerah	120 unit	Rp 22.440.000,00	APBD
					a. Belanja Operasi Rp 22.440.000		
					> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 22.440.000		
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
X	XX 01 2.12	8. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	Sekretariat Daerah	100%	Rp 506.767.824,00	APBD
X	XX 01 2.12 01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 259.863.624,00	APBD
					a. Belanja Operasi Rp 259.863.624		
					> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 259.863.624		
					> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		
X	XX 01 2.12 02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 194.215.872,00	APBD
					a. Belanja Operasi Rp 194.215.872		
					> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 194.215.872		
					> Belanja Hibah Rp -		
					b. Belanja Modal Rp -		
					c. Belanja Tidak terduga Rp -		
					d. Belanja Transfer Rp -		
X	XX 01 2.12 03	3. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	Rp 52.688.328,00	APBD
					a. Belanja Operasi Rp 52.688.328		
					> Belanja Pegawai Rp -		
					> Belanja Barang dan Jasa Rp 52.688.328		
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
X	XX 01 2.12	9. Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Kabupaten Pasuruan	100%	Rp 2.300.000.000,00	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
X	XX	01	2.12	01	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Kabupaten Pasuruan	56 Perangkat daerah	Rp 900.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 900.000.000,00	
								> Belanja Pegawai	Rp 1.029.000,00	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 898.971.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
X	XX	01	2.12	02	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan tatalaksana	Kabupaten Pasuruan	65 unit kerja	Rp 500.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi		
								> Belanja Pegawai	Rp 500.000.000,00	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 730.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp 499.270.000,00	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
X	XX	01	2.12	03	3. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	3 laporan	Rp 500.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 500.000.000,00	
								> Belanja Pegawai	Rp 365.000,00	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 499.635.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
X	XX	01	2.12	04	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Koordinasi	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	Rp 400.000.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	Rp 400.000.000,00	
								> Belanja Pegawai	Rp -	
								> Belanja Barang dan Jasa	Rp 400.000.000,00	
								> Belanja Hibah	Rp -	
								b. Belanja Modal	Rp -	
								c. Belanja Tidak terduga	Rp -	
								d. Belanja Transfer	Rp -	
X	XX	01	2.14		9. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	100%	1.359.727.350,00	APBD
X	XX	01	2.14	01	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	748.794.000,00	APBD
								a. Belanja Operasi	748.794.000,00	
								> Belanja Pegawai	0,00	
								> Belanja Barang dan Jasa	748.794.000,00	
								> Belanja Hibah		
								b. Belanja Modal		
								c. Belanja Tidak terduga		
								d. Belanja Transfer		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
X	XX	01	2.14	02	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	24 Kegiatan	418.428.350,00	APBD
									a. Belanja Operasi	418.428.350,00
									> Belanja Pegawai	
									> Belanja Barang dan Jasa	418.428.350,00
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.14	03	3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	192.505.000,00	APBD
									a. Belanja Operasi	192.505.000,00
									> Belanja Pegawai	
									> Belanja Barang dan Jasa	192.505.000,00
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.01		10. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretariat Daerah	100%	395.093.930,00	APBD
X	XX	01	2.01	01	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	Sekretariat Daerah	12 dokumen perencanaan setda	243.190.940,00	APBD
									a. Belanja Operasi	243.190.940,00
									> Belanja Pegawai	
									> Belanja Barang dan Jasa	243.190.940,00
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.01	06	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Sekretariat Daerah	11 dokumen pelaporan setda	151.902.990,00	APBD
									a. Belanja Operasi	151.902.990,00
									> Belanja Pegawai	
									> Belanja Barang dan Jasa	151.902.990,00
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	
									c. Belanja Tidak terduga	
									d. Belanja Transfer	
X	XX	01	2.01		11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	18.653.109.570,00	APBD
X	XX	01	2.01	01	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	14 bulan	17.169.562.190,00	APBD
									a. Belanja Operasi	17.169.562.190,00
									> Belanja Pegawai	17.169.562.190,00
									> Belanja Barang dan Jasa	
									> Belanja Hibah	
									b. Belanja Modal	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
X	XX 01 2.01 03	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	4 dokumen penatausahaan keuangan setda	1.483.547.380,00	APBD
					a. Belanja Operasi	1.483.547.380,00	
					> Belanja Pegawai	1.196.809.500,00	
					> Belanja Barang dan Jasa	286.737.880,00	
					> Belanja Hibah		
					b. Belanja Modal		
					c. Belanja Tidak terduga		
					d. Belanja Transfer		
					TOTAL BELANJA	61.135.348.505,00	

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan bersifat administratif yang dinamis, dimana pelayanan administrasi yang dilakukan sifatnya tidak menentu dan tergantung dari kegiatan sebagai penunjang suksesnya kegiatan, oleh karena itu yang perlu diperhatikan :

- Analisa perkiraan kebutuhan anggaran yang diperlukan yang didasarkan pada kenaikan harga barang dan, inflasi dan kenaikan harga BBM.
- Analisa perkiraan kebutuhan barang yang diperlukan;
- Kecepatan dalam melayani kegiatan – kegiatan yang ada;
- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan dan kebijakan yang terbaru agar tidak menimbulkan permasalahan;
- Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dengan dinas dan instansi terkait;
- Kecepatan dalam pelayanan administrasi surat menyurat;
- Peningkatan kinerja tenaga harian lepas;
- Penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, meliputi penyusunan pedoman APBD dan petunjuk teknis maupun standar kegiatan pembangunan, perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelayanan administrasi di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, serta transmigrasi dan tenaga kerja;
- Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan pemantauan / monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan fisik;

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Untuk mencapai suatu tujuan perlu acuan dalam pelaksanaan :

- Norma dan aturan yang berlaku
- Kerja sama dan koordinasi yang efektif
- Kebijakan yang berorientasi pada keadilan
- Lingkungan yang memadai
- Pertimbangan yang logis
- Rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan

5.3 Rencana tindak lanjut

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan perlu ditindak lanjuti dengan :

- Analisa kebutuhan biaya yang didasarkan pada tahun sebelumnya ditambah dengan perkiraan kenaikan biaya

- Konsisten dalam melaksanakan tugas dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku
- Selalu koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang terkait

Setelah rencana Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dan diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan seluruh stakeholder dan penyusunannya akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF